

Daftar Undang-Undang OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA
- 2 PERSYARATAN INVESTASI
- 3 KETENAGAKERJAAN
- 4 KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM
- 5 KEMUDAHAN BERUSAHA
- 6 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
- 7 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 8 PENGENAAN SANKSI (MENGHAPUS PIDANA)
- 9 PENGADAAN LAHAN
- 10 KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH
- 11 KAWASAN EKONOMI

Catatan:
Terdapat UU yang
tergolongkan ke
dalam lebih dari 1
(satu) kluster karena
keterkaitan
substansi

Izin Lokasi

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Izin Lingkungan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

IMB & SLF

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Migas, Minerba, Panas Bumi, Ketenagalistrikan, Ketenaganukliran

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambak Garam
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Telekomunikasi dan Informatika, Pos

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perdagangan, Industri, UMKM, Koperasi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Kesehatan, Obat dan Makanan, Pendidikan, Keagamaan, Ristek, Kebudayaan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Keamanan dan Pertahanan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Ketenagakerjaan

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



2. KLASTER PERSYARATAN INVESTASI



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers



1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja



4. KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM



1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tahun tentang Koperasi
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
7. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara



7. KLASTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- 1) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
- 8) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 10) Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 12) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit

7. KLASTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (2)



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 18) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 19) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 20) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 21) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 24) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



8. KLASTER SANKSI



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Pertambak Garam
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



10. KLASTER KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH

*Dibuat Norma Baru



1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian



19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
30. Undang-Undang Nomor Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
31. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
32. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
33. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
35. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
36. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

37. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
38. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
40. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
42. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Arsitek
43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
44. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
45. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
46. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
47. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
48. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
49. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
50. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
51. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
52. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
53. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
54. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

